



PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2027.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

- 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM

dan

LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2027.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Karangasem
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

12. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapanewon yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kalurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kalurahan diwilayah Kapanewon tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap

- anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kalurahan.
 22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
 23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Pengertian
- 1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II : PROFIL KALURAHAN

- 2.1. Kondisi Kalurahan
 - 2.1.1. Sejarah Kalurahan
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Kalurahan
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Kalurahan
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan
 - 2.2.3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

1 VISI

Visi adalah gambaran/cita-cita bersama mengenai masa depan, berupa kesepakatan/komitmen murni. Visi berguna untuk menentukan perubahan lingkungan sehingga pemerintah dapat bergerak maju menuju masa depan yg lebih baik. Visi dari Pemerintah Kalurahan Karangasem adalah :

**“GOTONG ROYONG MEMBANGUN KALURAHAN MANDIRI YANG JUJUR,
ADIL, SEJAHTERA BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA”**

a. MISI

Misi merupakan rumusan secara umum dalam upaya yang akan oleh pemerintah desa dalam rangka menuwujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan dengan tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. Adapun Misi Kalurahan Karangasem sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Meningkatkan profesionalitas etos kerja Pamong Kalurahan dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan dalam melayani masyarakat.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana Kalurahan yang memadai
4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga masyarakat

5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat kalurahan yang maksimal
6. Meningkatkan kehidupan masyarakat kalurahan Karangasem secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
7. Mengembangkan ketersediaan fasilitas penunjang Kalurahan Wisata melalui program peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata aneka hayati
8. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di masing-masing Padukuhan.

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Strategi Pembangunan Kalurahan :

1. Meningkatkan Keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
2. Mengembangkan perencanaan pembangunan partisipatif
3. Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam bidang hukum
4. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa menuju terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia
5. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
6. Meningkatkan keterampilan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan
7. Memperkuat dan memperluas kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah maupun swasta dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan
8. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan etos kerja Pamong Kalurahan
9. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan serta masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan
10. Meningkatkan kemampuan profesionalisme Pamong Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
11. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata dengan Dinas Pariwisata maupun pihak swasta
12. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara merata di semua wilayah

13. Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
14. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Industri Rumah tangga dan Perdagangan

Pasal 5

Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan:

1. Menggali potensi Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK)
2. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
3. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
4. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
5. Meningkatkan Kalurahan menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
6. Terwujudnya kualitas pemerintahan Kalurahan dan Bamuskal dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Kalurahan
7. Upaya peningkatan kesejahteraan Pamong Kalurahan dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku
8. Penguatan manajemen keuangan Kalurahan sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat
9. Upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan serta penanganan stunting.
10. Peningkatan fasilitas penunjang kinerja Bamuskal dan Lembaga Keamsayarakatan Kalurahan melalui ketersediaan sarana prasarana dan biaya operasional yang memadai.

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

A BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

- 1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

- Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
- 2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
 - Pengadaan peralatan kerja
 - Pengadaan mebeleur
 - Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
 - Pengadaan mesin/kartu absensi
 - Penyediaan jasa jaminan barang milik desa
 - Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- 3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyusunan monografi desa
 - Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
 - Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
- 4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- Pengisian perangkat desa
- Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
- Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa
- Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
- Pengadaan pakaian dinas/seragam
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
- Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

5 Sub Bidang Pertanahan

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin (PTSL)
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa
- Sertifikasi tanah milik desa
- Pengadaan tanah milik desa
- Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga
- Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
- Perapatan patok batas desa
- Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

B BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1 Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
- Pembinaan taman bacaan masyarakat
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2 Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

- Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
- Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
- Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
- Surveilans berbasis masyarakat
- Insentif kader kesehatan/KB
- Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa
- Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal
- Pemeliharaan bangunan penampung air komunal
- Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
- Pemberian stimulan jamban sehat
- Pengelolaan sampah desa/permukiman

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Hutan Milik Desa
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
- Pengelolaan Wana Desa
- Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa
- Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan
- Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- Pengelolaan radio komunitas milik desa
- Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- Pemeeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif

8 Sub Bidang Pariwisata

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

- Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
- Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
- Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten
- Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa
- Pemeliharaan Rest Area Milik Desa
- Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata

C BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
- Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
- Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
- Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
- Pembinaan Jaga Warga
- Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
- Pengadaan seragam Satlinmas
- Pembinaan dan pengembangan paralegal desa
- Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
 - Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
 - Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
 - Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
 - Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
 - Pelaksanaan sunatan massal
 - Pembinaan lembaga desa pelestari adat
 - Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
 - Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
 - Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
 - Operasional Karang Taruna
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan Lembaga Adat
 - Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - Pembinaan PKK
 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
 - Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
 - Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
 - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - Pembinaan RT/RW

- Operasional LPMD dan/atau LPMD
- Operasional PKK
- Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat**)
- Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan
- Pembinaan kelompok perikanan darat
- Pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan milik desa
- Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
- Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa
- Pemeliharaan lumbung desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
- Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif

3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Peningkatan Kapasitas BPD
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
- Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa
- Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
- Pembinaan ketahanan keluarga
- Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
- Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
- Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)
- Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak
- Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional
- Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa
- Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdес)
- Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa
- Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

E BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Penanggulanan Bencana
- 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Penanganan Keadaan Darurat
- 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak

Pasal 7

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama 6 (enam) tahun.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Karangasem.

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 08 Agustus 2022

LURAH,

ttd

PARIMIN

Diundangkan di Ponjong
Pada tanggal 08 Agustus 2022

CARIK,

ttd

KRISNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 2

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Kalurahan Karangasem dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) ini memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta disusun berdasarkan usulan dari di masing-masing Padukuhan di Kalurahan Karangasem.

Penyusunan RPJM-Kal mengarah pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan usulan (bottom up planning). Artinya masyarakat dapat mengusulkan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di tiap- tiap Padukuhan guna menunjang terwujudnya derajat kesejahteraan masyarakat.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM-Kal ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Kalurahan, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup kalurahan sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) ini adalah sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Karangasem, masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kalurahan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal).

Kemudian apabila dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) ini masih

banyak hal-hal yang kurang sempurna, kami mohon maaf dan mohon petunjuk. Atas kritik dan sarannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Kita berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Karangasem, Juni 2022
Lurah Karangasem,

PARIMIN

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM-Kal.....	9
BAB II. PROFIL KALURAHAN	12
2.1. Kondisi Umum Kalurahan	12
2.1.1 Sejarah Kalurahan	12
2.1.2 Kondisi Geografis Kalurahan	22
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Kalurahan	28
2.1.4 Kondisi Ekonomi Kalurahan	29
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Kalurahan	29
2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan	32
2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan	32
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan	33
2.3. Potensi dan Masalah.....	45
2.3.1. Potensi	45
2.3.2. Masalah.....	46
BAB III. VISI DAN MISI	48
3.1. Visi	48
3.2. Misi	48
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN	50
4.1. Strategi Internal.....	50
4.2. Strategi Eksternal	51
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	52
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan	52
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan	53
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	59
6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan	59
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	61
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	63
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	64
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya	66
BAB VII PENUTUP.....	67
7.1. Kesimpulan	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM-Kal
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kalurahan
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Kalurahan
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.....
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Kalurahan
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah.....
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan.....
15. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan ...
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ..
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan, Musyawarah Dusun / Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan, Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM-Kal)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan, Musyawarah Dusun / Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan, Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM-Kal)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan, Musyawarah Dusun / Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan, Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM-Kal)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKAL) Kalurahan Ponjong tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM-Kal
22. Peta Kalurahan
23. Foto Kegiatan / Foto Kalurahan (Pengkajian Keadaan Kalurahan (PKD), Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan, Musyawarah Dusun / Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan, Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM-Kal)

PENDAHULUAN

1.1. LATARBELAKANG

Secara normatif penyusunan RPJM Kalurahan merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan serta memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyusunan RPJM Kalurahan ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas kalurahan mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat kalurahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan berpedoman pada RPJM Kal yang disusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur

kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka kalurahan wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kal) untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Kalurahan/lembaga (Renstra Pemkal) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun dan menyesuaikan Rencana Pembangunan Kalurahan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan kalurahan (RPJM-Kalurahan). Karena RPJM-Kalurahan merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka, kualitas RPJM-Kalurahan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKalurahan).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) dan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) ditetapkan dengan peraturan kalurahan dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan dikalurahan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Mendasar dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat kalurahan yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal), maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasari pada:

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di kalurahan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat kalurahan.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di kalurahan maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan kalurahan dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Karangasem tahun 2022-2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunankalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan kalurahan,pembinaan kemasyarakatan,pemberdayaan masyarakat kalurahan,didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada,permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan kalurahan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh danberkembangdikalurahan.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan kalurahan khususnya Kalurahan Karangasem sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM-Kal Karangasem tahun 2022- 2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kalurahan Karangasem atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan,pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022-2027 dan kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKalurahan).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Lurah Karangasem dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah Karangasem dalam laporan pertanggung jawaban Lurah yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasem tahun 2022 – 2027 disusun dengan maksud yaitu:

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Lurah yang memuat arah kebijakan keuangan kalurahan, strategi pembangunan kalurahan, kebijakan umum, dan program kegiatan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan dan Lembaga-Lembaga Kalurahan dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai bahan dalam forum Muskal, Musduk, Musrenbangkal, serta penyusunan RKP Kalurahan;
3. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kalurahan Karangasem dalam periode waktu 6 (tahun) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasem tahun 2022 – 2027 disusun dengan tujuan yaitu:

1. Merumuskan rencana pembangunan Kalurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat:
2. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Kalurahan:
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di Kalurahan dalam proses pembangunan.
5. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Kalurahan;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasem Tahun 2022 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan

- Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul 1 Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 - l. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 - m. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM-KAL

1.4.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Kal

Tim Penyusun RPJM Kalurahan Karangasem Tahun 2022-2027 ditetapkan melalui Keputusan Lurah Karangasem Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 9 Januari 2022. Tim Penyusun RPJM Kalurahan Karangasem ini beranggotakan 11 (sebelas) orang yang terdiri dari

unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kalurahan, Tokoh Masyarakat dan keterwakilan perempuan sebagaimana tercantum dalam dokumen SK terlampir.

1.4.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Kalurahan dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Setelah penjabaran visi & misi Lurah Karangasem dilaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kalurahan dengan kebijakan pembangunan kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2024 sebagai rujukan atau parameter kebijakan pembangunan kalurahan sebagai dasar penyusunan RPJM-Kal Karangasem Tahun 2022-2027.

1.4.3. Pengkajian keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa (PKD) bertujuan untuk mengetahui profilsituasi dan kondisi real, mengetahui masalah, potensi dan gagasan darimasing-masing lokasi/padukuhan (bottom-up) sehingga program kegiatan yang ada didalam RPJMKal dapat efektif, efisien dan tepat sasaran. Musyawarah Padukuhan (Musduk) dilaksanakan dari tanggal 08-13 Pebruari 2022. Setelah itu dilaksanakan musyarawah Pengkajian Keadaan Kalurahan berupa rekapitulasi masalah,potensi,dan gagasan serta peta social Kalurahan.

1.4.4. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset kalurahan

Pemetaan dan pengembangan aset potensi kalurahan dilaksanakan dengan pendataan masalah, potensi dan gagasan dari lembaga-lembaga kalurahan serta dengan melihat data asset kalurahan terbaru.Hasil pemetaan berupa rekpitulasi masalah,potensi dan gagasan dari lembaga-lembaga yang ada.

1.4.5. Penyusunan rancangan RPJM-Kal

Penyusunan rancangan RPJM Kalurahan Karangasem Tahun 2022-2027 dilaksanakan oleh Tim Penyusun dengan

melaksanakan beberapa kali musyawarah.

1.4.6. Musyawarah Kalurahan (Muskal) untuk membahas dan menyepakati RPJM-Kal

Muskal untuk menyepakati Rancangan RPJM-Kal Ponjong Tahun 2022-2027 dilaksanakan pada tanggal..... Rancangan awal dan tahapan penyusunan diunggah dilaksanakan dengan baik sehingga muskal dapat berjalan dengan lancar.

1.4.7. Sidang Bamuskal untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kalurahan tentang RPJM-Kal

Pembahasan RPJM-Kal Karangasem dilaksanakan pada tanggal.....Pembahasan atau sidang pembahasan berjalan dengan baik dan dapat menyepakati Rancangan RPJM-Kal Karangasem Tahun 2022-2027 disepakati dan ditetapkan.

1.4.8. Sosialisasi RPJM-Kal

Penyebarluasan atau sosialisasi RPJM-Kal Karangasem Tahun 2022-2027 dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya dengan sosialisasi melalui media sosial serta melalui pertemuan-pertemuan warga.

PROFIL KALURAHAN

2.1. KONDISI UMUM KALURAHAN

2.1.1. Sejarah Kalurahan Karangasem

a. Sejarah awal Kalurahan Karangasem .

Sekilas sejarah Kalurahan Karangasem yang dimulai pada tahun 1921. Adapun susunan perangkat/pamong Kalurahan adalah sebagai berikut :

1. Ki SURO DIKROMO (1921-1946)

Kalurahan Karangasem dulu dipimpin oleh lurah pertama antara tahun 1921-1946 oleh Ki Suro Dikromo.

Carik	: Sastro Wardoyo
Jaga Miruda	: Wono Pawiro
Kamituwa	: Atmo Rejoko
Dukuh Klepu	: Kartomo
Dukuh Karangasem	: Joyo setomo
Dukuh Jomblang Tengah	: Kromo dimejo
Dukuh Jati	: Iman Rejo
Dukuh Jomblang Lor	: Kamtari
Dukuh Ngabean Lor	Kasan Nawi
Dukuh Ngabean Kidul	: Tarto
Dukuh Betoro Lor	: --
Dukuh Betoro Kidul	: --

2. Ki Sastro Dimejo (1946-1962)

Selanjutnya dari tahun 1946- 1962 dipimpin oleh Ki Sastro Dimejo.

Carik	: Harjo
Kemakmuran	: Suro Disastro
Keamanan	: Atmo Rejoko
Sosial	: Pawiro Setomo
Kaum	: Mustat
Dukuh Klepu	: -
Dukuh Karangasem	: Joyo setomo
Dukuh Jomblang Tengah	: Kromo dimejo
Dukuh Jati	: Atmo Sukardi
Dukuh Jomblang Lor	: Kamtari
Dukuh Ngabean Lor	Kasan Nawi
Dukuh Ngabean Kidul	: Tarto
Dukuh Betoro Lor	: --
Dukuh Betoro Kidul	: Suwito

3. **Ki Suro Disastro (1962-1965)**

Selanjutnya dari tahun 1962- 1965 dipimpin oleh Ki Sastro Dimejo:

Carik	: Harjo
Kemakmuran	: Suro Disastro
Keamanan	: Atmo Rejoko
Sosial	: Pawiro Setomo
Kaum	: Mustat
Dukuh Klepu	: -
Dukuh Karangasem	: Joyo setomo
Dukuh Jomblang Tengah	: Kromo dimejo
Dukuh Jati	: Atmo Sukardi
Dukuh Jomblang Lor	: Kamtari
Dukuh Ngabean Lor	: Kasan Nawi
Dukuh Ngabean Kidul	: Tarto

Dukuh Betoro Lor : --
Dukuh Betoro Kidul : Suwito

4. Pj. Bpk Nasim (1965-1966)

Selanjutnya dari tahun 1962- 1965 dipimpin oleh Pj. Bpk Nasim (dari Ponjong):

Carik : Prapto
Kemakmuran : Yitno Warsoyo
Keamanan : Budi Wiratmo
Sosial : Pawiro
Kaum : Mustat
Dukuh Klepu : Partorejo
Dukuh Karangasem : Joyo setomo
Dukuh Jomblang Tengah : Wasiman
Dukuh Jati : Atmo Sukardi
Dukuh Jomblang Lor : Somadiono
Dukuh Ngabean Lor : Karno
Dukuh Ngabean Kidul : Harnoto
Dukuh Betoro Lor : --
Dukuh Betoro Kidul : Karsorejo

5. Bpk Pujo Sumarto (1967-1995)

Selanjutnya dari tahun 1967- 1995 dipimpin oleh Bpk Pujo Sumarto

Carik : Paeran
Kemakmuran : Sutino HS
Keamanan : Darmorejo
Sosial : Samto Saroyo

Kaum	: Mustat
Dukuh Klepu	: Partorejo
Dukuh Karangasem	: Joyo setomo
Dukuh Jomblang Tengah	: Wasiman
Dukuh Jati	: Atmo Sukardi
Dukuh Jomblang Lor	: Somadiono
Dukuh Ngabean Lor	: Karno
Dukuh Ngabean Kidul	: Harnoto
Dukuh Betoro Lor	: --
Dukuh Betoro Kidul	: Karsorejo

Pada tahun 1980 dukuh Ngabean Kidul dijabat oleh Bpk Nardi

Pada Tahun 1979 Dukuh Betoro Lor mulai dijabat oleh Bp. Tugiran

Pada Tahun 1982 Dukuh Karangasem mulai dijabat oleh Bp. Sadeli

Pada Tahun 1982 Dukuh Klepu mulai dijabat oleh Bp. Saronto

Ketiga jabatan dukuh tersebut terpilih melalui pilihan masyarakat langsung

Pada Tahun 1987 Dukuh Jomblang Tengah dijabat oleh Bpk. Wakiman

Pada Tahun 1988 ada pengisian Kaur Umum yang dijabat oleh Bpk Lugiyo

Pada Tahun 1991 Dukuh Betoro Kidul mulai dijabat oleh Bpk Mujiyo

Pada Tahun 1991- 1992 Dukuh Ngabean Kidul dijabat oleh Bpk Suwardi

Pada Tahun 1991-1993 Dukuh Jati dijabat oleh Bpk Agus Sudyarto

Pada Tahun 1993 Sosial/Kaur Keuangan mulai dijabat oleh Ibu Suparni

Pada Tahun 1993 Kaum/Kaur Kesra mulai dijabat oleh Bpk Gunadi

Pada Tahun 1995 Dukuh Jati mulai dijabat oleh Bpk Warijan

Pada Tahun 1995 Dukuh Ngabean Kidul mulai dijabat oleh Bpk Mukina

Pada tahun 1995 Bpk. Pujo Sumarto telah habis masa jabtannya.

Sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan sambil menunggu proses pemilihan Kepala Desa maka diangkat Penjabat Kepala Desa yaitu Bpk.

Paeran

6. Pj. Bpk Paeran (1995-1996)

Selanjutnya dari tahun (1995 - 1996) dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Bpk Paeran

1. Sekretaris Desa : Paeran
2. Kaur Ekobang : Sutino HS
3. Kaur. Pemerintahan : Darmorejo
4. Kaur. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur Umum : Lugiyo
7. Dukuh Klepu : Saronto
8. Dukuh Karangasem : Sadeli
9. Dukuh Jombalng Tengah : Wakiman
10. Dukuh Jati : Warijan
11. Dukuh Jomblang Lor : Ratiyo
12. Dukuh Ngabean Lor : Karno
13. Dukuh Ngabean Kidul : Mukina
14. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
15. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
16. Staff : Muh Sayadi
17. Staff : Mujiyanto

Ditahun 1996 diadakan pemilihan kepala desa dan yang mencalonkan yaitu Maryanto, Sugiyo Harto dari dusun Ngabean Kidul Heni Swasono, SH dari dusun Jomblang Tengah dan Sugiyanto dusun Karangasem. Dan yang terpilih menjadi Kepala Desa Karangasem yaitu Maryanto.

7. Bpk Maryanto (periode 1 tahun 1996-2004 selama 8 tahun)

Selanjutnya dari tahun (1996- 2004) dipimpin oleh Bpk Maryanto.

Tahun 1996 :

1. Sekretaris Desa : Paeran

2. Kaur Ekobang : Sutino HS
3. Kaur. Pemerintahan : Darmo rejo
4. Kabag. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur Umum : Lugiyo
7. Dukuh Klepu : Saronto
8. Dukuh Karangasem : Sadeli
9. Dukuh Jombalng Tengah : Wakiman
10. Dukuh Jati : Warijan
11. Dukuh Jomblang Lor : Ratiyo
12. Dukuh Ngabean Lor : Karno
13. Dukuh Ngabean Kidul : Mukina
14. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
15. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
16. Staff : Muh Sayadi
17. Staff : Mujiyo

Pada tahun 1998 diadakan pengisian Perangkat Desa untuk jabatan Kabag. Ekobang dan Kabag. Pemerintahan. Adapun yang terpilih dan diangkat menjadi :

Kabag. Ekobang adalah Drs. Suharno, Kabag. Pemerintahan adalah Kasdi. Sehingga pada Tahun 1998 susunan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa : Paeran
2. Kaur Ekobang : Drs. Suharno
3. Kaur. Pemerintahan : Kasdi
4. Kaur. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur Umum : Lugiyo

7. Dukuh Klepu : Saronto
8. Dukuh Karangasem : Sadeli
9. Dukuh Jombalng Tengah : Wakiman
10. Dukuh Jati : Warijan
11. Dukuh Jomblang Lor : Ratiyo
12. Dukuh Ngabean Lor : Karno
13. Dukuh Ngabean Kidul : Mukina
14. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
15. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
16. Staff : Muh Sayadi
17. Staff : Mujiyo

Pada tahun 2002 sesuai dengan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2001 susunan perangkat desa ditambah satu jabatan yaitu Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) dan yang terpilih dan diangkat menjadi sekretaris BPD adalah Sdr. Komari. Selain pengisian Sekretaris BPD juga diadakan pengisian staf perangkat desa yang terpilih adalah Sdr. Nyamin. Pengisian staf hanya untuk satu.

Sehingga pada tahun 2002 susunan perangkat desa dan sekretaris BPD adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa : Paeran
2. Kaur. Ekobang : Drs. Suharno
3. Kaur. Pemerintahan : Kasdi
4. Kaur. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur. Umum : Lugiyo
7. Dukuh Klepu : Saronto
8. Dukuh Karangasem : Sadeli
9. Dukuh Jombalng Tengah : Wakiman
10. Dukuh Jati : Warijan

- 11. Dukuh Jomblang Lor : Ratiyo
- 12. Dukuh Ngabean Lor ` : Karno
- 13. Dukuh Ngabean Kidul : Mukina
- 14. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
- 15. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
- 16. Staff : Nyamin
- 17. Sekretaris BPD : Komari

8. Bpk Maryanto (periode ke 2 tahun 2004-2014 selama 10 tahun)

Selanjutnya dari tahun (2004- 2014) dipimpin oleh Bpk Maryanto. Pada periode ini adalah merupakan periode kedua (2) bagi Bpk Maryanto. Beliau mengikuti pemilihan Lurah yang diselenggarakan pada tahun 2004 yang diikuti oleh : Bpk Maryanto dan Bpk Fx Sularno.

Tahun 2004 – 2006 :

- 1. Sekretaris Desa : Paeran
- 2. Kaur. Ekobang : Drs. Suharno
- 3. Kaur. Pemerintahan : Kasdi
- 4. Kaur. Kesra : Gunadi
- 5. Kaur. Keuangan : Suparni
- 6. Kaur. Umum : Lugiyo
- 7. Dukuh Klepu : Saronto
- 8. Dukuh Karangasem : Sadeli
- 9. Dukuh Jombalng Tengah : Wakiman
- 10. Dukuh Jati : Warijan
- 11. Dukuh Jomblang Lor : Ratiyo
- 12. Dukuh Ngabean Lor ` : Karno
- 13. Dukuh Ngabean Kidul : Mukina
- 14. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
- 15. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo

16. Staff : Nyamin

17. Sekretaris BPD : Komari

Pada tahun 2005 Bpk Karno selaku Dukuh Ngabean Lor memasuki masa pensiun dan pada tahun tersebut diadakan pemilihan langsung oleh masyarakat untuk memilih dukuh Ngabean Lor dan yang terpilih adalah Sdr. Sutanta.

Pada tahun 2006 Bpk Paeran selaku Sekretaris Desa memasuki masa pensiun dan belum terisi karena mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga jabatan sekretaris desa karena belum terisi secara definitif, Lurah menunjuk Bpk Lugiyo (Kaur Umum) sebagai Pj. Sekretaris Desa.

Sehingga pada tahun 2006 susunan perangkat desa adalah sebagai berikut

1. Pj. Sekretaris Desa : Lugiyo
2. Kaur. Ekobang : Drs. Suharno
3. Kaur. Pemerintahan : Kasdi
4. Kaur. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur. Umum : Lugiyo
7. Dukuh Klepu : Saronto
8. Dukuh Karangasem : Sadeli
9. Dukuh Jombalng Tengah : Wakiman
10. Dukuh Jati : Warijan
11. Dukuh Jomblang Lor : Ratiyo
12. Dukuh Ngabean Lor : Sutanta
13. Dukuh Ngabean Kidul : Mukina
14. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
15. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
16. Staff : Nyamin
17. Sekretaris BPD : Komari

Pada tahun 2007 Susunan Organisasi Pemerintah Desa, diadakan perubahan nama / nomenklatur pada masing - masing jabatan antara lain :

Penyebutan Kaur menjadi Kabag untuk Jabatan Kaur. Ekobang, Kaur Pemerintahan dan Kaur Kesejahteraan Rakyat. Selain itu ada jabatan baru yang sebelumnya tidak ada yaitu Kepala Urusan Perencanaan yang diisi dari jabatan lama yaitu Sekretaris BPD.

Sehingga susunan perangkat desa menjadi :

1. Pj. Sekretaris Desa : Lugiyo
2. Kabag. Pembangunan : Drs. Suharno
3. Kabag. Pemerintahan : Kasdi
4. Kabag. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur. Umum : Lugiyo
7. Dukuh Klepu : Saronto
8. Dukuh Karangasem : Sadeli
9. Dukuh Jombalng Tengah : Wakiman
10. Dukuh Jati : Warijan
11. Dukuh Jomblang Lor : Ratiyo
12. Dukuh Ngabean Lor : Sutanta
13. Dukuh Ngabean Kidul : Mukina
14. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
15. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
16. Staff : Nyamin
17. Kaur Perencanaan : Komari

SOTK sesuai perturan daerah ini merubah/konversi dari nama Kepala Urusan menjadi Kepala Bagian pada Kaur Ekobang, Kaur Pemerintahan dan Kaur Kesejahteraan Rakyat serta merubah jabatan Sekretaris BPD menjadi

Kepala Urusan Perencanaan.

Pada tahun 2008 Bpk. Mukina (dukuh Ngabean Kidul) mengundrkan diri dan pada tahun 2009 diadakan pemilihan dukuh Ngbean Kidul yang dimenangkan/terpilih adalah Sdr. Purnomo. Pemilihan hanya diikuti satu calon melawan kotak kosong.

Sehingga pada tahun 2009 susunan perangkat Desa adalah :

1. Pj. Sekretaris Desa : Lugiyo
2. Kabag Pembangunan : Drs. Suharno
3. Kabag. Pemerintahan : Kasdi
4. Kabag. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur Umum : Lugiyo
7. Kaur Perencanaan : Komari
8. Dukuhan Klepu : Saronto
9. Dukuhan Karangasem : Sadeli
10. Dukuhan Jombalng Tengah : Wakiman
11. Dukuhan Jati : Warijan
12. Dukuhan Jomblang Lor : Ratiyo
13. Dukuhan Ngabean Lor : Sutanta
14. Dukuhan Ngabean Kidul : Purnomo
15. Dukuhan Betoro Lor : Tugiran
16. Dukuhan Betoro Kidul : Mujiyo
17. Staff : Nyamin

Pada tahun 2010 Bpk. Sutanta (dukuh Ngabean Lor) mengundrkan diri sedangkan pada tahun 2011 Bpk Ratiyo (dukuh Jomblang Lor) memasuki masa pensiun. Pada tahun 2011 diadakan pemilihan dukuh Ngbean Lor dan dukuh Jomblang Lor yang diikuti oleh :

1. Padukuhan Ngabean Lor (Istianta dan Agus Saryanto)

Pada pemilihan ini terjadi perolehan suara sah yang sama sehingga

diadakan pemilihan kedua dan dimenangkan oleh Bpk. Agus Saryanto.

2. Padukuhan Jomblang Lor (Sugiyatno dan Warsito)

Yang terpilih adalah Bpk. Warsito

Pada tahun yang sama (tahun 2011) Dukuh Karangasem (Bpk Sadeli) memasuki masa pensiun dan diadakan pemilihan dukuh Karangasem yang diikuti oleh : Aan Dwi Wahyudi, Aris Wantoro, Nurohmat Mudzakir dan Sukarmin.

Yang terpilih adalah Bpk. Sukarmin

Sehingga pada tahun 2011 susunan perangkat Desa adalah :

1. Pj. Sekretaris Desa : Lugiyo
2. Kabag Pembangunan : Drs. Suharno
3. Kabag. Pemerintahan : Kasdi
4. Kabag. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur Umum : Lugiyo
7. Kaur Perencanaan : Komari
8. Dukuh Klepu : Saronto
9. Dukuh Karangasem : Sukarmin
10. Dukuh Jomblang Tengah : Wakiman
11. Dukuh Jati : Warijan
12. Dukuh Jomblang Lor : Warsito
13. Dukuh Ngabean Lor : Agus Saryanto
14. Dukuh Ngabean Kidul : Purnomo
15. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
16. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
17. Staff : Nyamin

Pada Tahun 2013 Kabag. Pembangunan (Bpk Drs. Suharno) mengundurkan diri dan untuk mengisi jabatan yang kosong maka yang ditunjuk sebagai Pj. Kabag Pembangunan adalah Bpk Komari.

Pada tahun 2014 Dukuh Jomblang Tengah (Bpk.Wakiman) memasuki masa pensiun sehingga diadakan Pemilihan Dukuh Jomblang tengah yang diikuti oleh : Bpk. Riyanta, Bpk.Parwanto, Bpk.Wiwin Ardiyanto dan Bpk. Sugiran dan yang terpilih adalah Bpk. Riyanta

Selain itu, pada tahun 2014 juga diadakan pengisian Perangkat Desa untuk jabatan Kabag. Pembangunan dan 2 Pada tahun 2014 ini dilaksanakan ujian penjarangan dan penyaringan perangkat desa untuk jabatan Kasi Pelayanan. Setelah dilaksanakan ujian yang lolos menduduki jabatan Kabag. Pembangunan adalah Bpk. Endriyanto, SE sedangkan Sdr. Aan Dwi Wahyudi dan Sdr. Radik Arlistiawan sebagai Staf Perangkat Desa

Sehingga pada tahun 2014 susunan perangkat Desa adalah :

1. Pj. Sekretaris Desa : Lugiyo
2. Kabag Pembangunan : Endriyanto, SE
3. Kabag. Pemerintahan : Kasdi
4. Kabag. Kesra : Gunadi
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Kaur Umum : Lugiyo
7. Kaur Perencanaan : Komari
8. Dukuh Klepu : Saronto
9. Dukuh Karangasem : Sukarmin
10. Dukuh Jomblang Tengah : Wakiman
11. Dukuh Jati : Warijan
12. Dukuh Jomblang Lor : Warsito
13. Dukuh Ngabean Lor : Agus Saryanto
14. Dukuh Ngabean Kidul : Purnomo
15. Dukuh Betoro Lor : Tugiran

- 16. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
- 17. Staff : Nyamin
- 18. Staf : Aan Dwi Wahyudi
- 19. Staf : Radik Arlistiawan

Pada bulan Mei tahun 2014 Bpk. Sukarmin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dukuh Karangasem dan yang ditunjuk sebagai Penjabat Dukuh adalah Bpk. Nyamin.

Pada pertengahan tahun 2014 tepatnya bulan Juli 2014 Kepala Desa (Bpk. Maryanto) memasuki masa akhir jabatan. Dan untuk mengisi kekosongan Jabatan yang diangkat menjadi penjabat Kepala Desa adalah Bpk Kasdi (Kabag. Pemerintahan).

Diantara banyak program pembangunan yang dilaksanakan, ada beberapa program kegiatan pembangunan yang menjadi kegiatan pembangunan yang sangat berkesan yaitu : Pembangunan Kantor Desa bagian selatan (tahun 2011 dilanjutkan tahun 2014) dan Pembangunan Aula/Joglo Balai Desa (tahun 2012 sampai dengan tahun 2014) yang tidak menggunakan iuran/sumbangan uang dari masyarakat.

9. Pj. Bpk Kasdi (Juli 2014- Juli 2015)

Selanjutnya pada tahun 2014 (Juli 2014- Juli 2015) dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Bpk Kasdi.

Pada tahun 2015 Kabag. Kesejahteraan Rakyat (Bpk Gunadi) mengundurkan diri dikarenakan sakit dan yang diangkat menjadi Penjabat Kabag. Kesejahteraan Rakyat adalah Bpk Endriyanto, SE

Pada bulan Januari 2015 Bpk Lugiyo selaku Kaur. Umum memasuki masa pensiun dan yang ditunjuk menjadi Penjabat Kaur Umum adalah Bpk. Radik Arlistiawan. Untuk jabatan Penjabat Sektretaris Desa dijabat oleh Bpk. Komari

Sehingga pada periode Juli 2015 sampai dengan Januari 2015 susunan

Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Pj. Sekretaris Desa : Komari
2. Kabag. Pembangunan : Endriyanto, SE
3. Kabag. Pemerintahan : Kasdi
4. Pj. Kabag. Kesra : Endriyanto, SE
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Pj. Kaur Umum : Radik Arlistiawan
7. Kaur Perencanaan : Komari
8. Dukuh Klepu : Saronto
9. Pj. Dukuh Karangasem : Nyamin
10. Dukuh Jomblang Tengah : Riyanta
11. Dukuh Jati : Warijan
12. Dukuh Jomblang Lor : Warsito
13. Dukuh Ngabean Lor : Agus Saryanto
14. Dukuh Ngabean Kidul : Purnomo
15. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
16. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
17. Staff : Nyamin
18. Staf : Aan Dwi Wahyudi
19. Staf : Radik Arlistiawan

10. Pj. Bpk Sunardi, SIP (Juli 2015- Desember 2015)

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pejabat Kepala Desa harus diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk. Oleh sebab itu pada bulan Juli tahun 2015 ada pergantian Pejabat Kepala Desa dari Bapak Kasdi kepada Bapak Sunardi , SIP (PNS/Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Ponjong).

Pada bulan Oktober tahun 2015 diadakan Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Gunungkidul. Khususnya di Kalurahan Karangasem diikuti oleh 2 calon yaitu :

1. Bpk. Maryanto
2. Ibu Dwi Wahyuni

Dan yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Bpk. Maryanto

Pada tahun 2015 juga ada kegiatan pembangunan sarana kantor desa dibagian utara (sekarang ruang kantor Lurah, Sekretariat dan ruang pelayanan umum)

11. Bpk. Maryanto Periode ke 3 (Desember 2015 - Desember 2021)

Susunan Perangkat Desa pada awal tahun (Januari 2016) adalah sebagai berikut:

1. Pj. Sekretaris Desa : Kasdi
2. Kabag Pembangunan : Endriyanto, SE
3. Kabag. Pemerintahan : Kasdi
4. Pj. Kabag. Kesra : Endriyanto, SE
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Pj. Kaur Umum : Radik Arlistiawan
7. Kaur Perencanaan : Komari
8. Dukuh Klepu : Saronto
9. Pj. Dukuh Karangasem : Nyamin
10. Dukuh Jomblang Tengah : Riyanta
11. Dukuh Jati : Warijan
12. Dukuh Jomblang Lor : Warsito
13. Dukuh Ngabean Lor : Agus Saryanto
14. Dukuh Ngabean Kidul : Purnomo
15. Dukuh Betoro Lor : Tugiran
16. Dukuh Betoro Kidul : Mujiyo
17. Staff : Nyamin
18. Staf : Aan Dwi Wahyudi
19. Staf : Radik Arlistiawan

Pada bulan Januari 2016 penjabat Sekretaris Desa berganti dari Bpk. Komari kepada Bpk. Kasdi karena Bpk. Komari ditunjuk sebagai Bendahara Desa.

Pada bulan Mei 2016 Bpk Purnomo mengundurkan diri dari jabatan sebagai dukuh Ngabean Kidul dan yang ditunjuk sebagai penjabat adalah Ibu Suparni (Kaur Keuangan)

Pada bulan Juli 2016 Bpk Tugiran (Dukuh Betoro Lor) memasuki masa pensiun dan yang ditunjuk sebagai penjabat adalah Bpk. Komari (Kaur. Perencanaan).

Pada bulan September 2016 Bpk Mujiyo (Dukuh Betoro Kidul) memasuki masa pensiun dan yang ditunjuk sebagai penjabat adalah Bpk. Agus Saryanto (Dukuh Ngabaeen Lor).

Sehingga susunan Perangkat Desa pada akhir tahun 2016 :

1. Pj. Sekretaris Desa : Kasdi
2. Kabag Pembangunan : Endriyanto, SE
3. Kabag. Pemerintahan : Kasdi
4. Pj. Kabag. Kesra : Endriyanto, SE
5. Kaur. Keuangan : Suparni
6. Pj. Kaur Umum : Radik Arlistiawan
7. Kaur Perencanaan : Komari
8. Dukuh Klepu : Saronto
9. Pj. Dukuh Karangasem : Nyamin
10. Dukuh Jomblang Tengah : Riyanta
11. Dukuh Jati : Warijan
12. Dukuh Jomblang Lor : Warsito
13. Dukuh Ngabean Lor : Agus Saryanto
14. Pj. Dukuh Ngabean Kidul : Suparni
15. Pj. Dukuh Betoro Lor : Komari
16. Pj. Dukuh Betoro Kidul : Agus Saryanto

- 17. Staff : Nyamin
- 18. Staf : Aan Dwi Wahyudi
- 19. Staf : Radik Arlistiawan

Sampai akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 ada sebanyak 7 Jabatan Perangkat Desa yang diisi oleh Penjabat.

Pada bulan Maret tahun 2017 ada perubahan nomenklatur untuk beberapa jabatan Perangkat Desa. Khusus Kepala Desa dan Dukuh dan Kepala urusan masih dengan nama/penyebutan yang lama.

Adapun perubahan tersebut pada jabatan :

Kepala Bagian Pembangunan menjadi Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Bagian Pemerintahan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menjadi Kepala Seksi Pelayanan

Kepala urusan umum menjadi Tata Usaha dan Umum.

Pada bulan Mei 2017 diadakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa untuk 7 jabatan yang diangkat menjadi Perangkat Desa adalah:

- 1. Sekretaris Desa : Krisnawati, S.Pd
- 2. Kasi. Pelayanan : Aan Dwi Wahyudi
- 3. Kaur. Tata Usaha dan Umum : Ria Ristiani
- 4. Dukuh Karangasem : Joko Sarjono, SE
- 5. Dukuh Ngabean Kidul : Yulianton
- 6. Dukuh Betoro Lor : Karjiyo
- 7. Dukuh Betoro Kidul : Sadeli

Sehingga mulai pertengahan tahun 2017 susunan perangkat desa adalah

- 1. Sekretaris Desa : Krisnawati, S,Pd
- 2. Kasi.Pembangunan : Endriyanto, SE
- 3. Kasi. Pemerintahan : Kasdi
- 4. Kasi Pelayanan : Aan Dwi Wahyudi

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 5. Kaur. Keuangan | : Suparni |
| 6. Kaur Tata Usaha dan Umum | : Ria Ristiani |
| 7. Kaur Perencanaan | : Komari |
| 8. Dukuh Klepu | : Saronto |
| 9. Dukuh Karangasem | : Joko Sarjono, SE |
| 10. Dukuh Jomblang Tengah | : Riyanta |
| 11. Dukuh Jati | : Warijan |
| 12. Dukuh Jomblang Lor | : Warsito |
| 13. Dukuh Ngabean Lor | : Agus Saryanto |
| 14. Dukuh Ngabean Kidul | : Yulianton |
| 15. Dukuh Betoro Lor | : Karjiyo |
| 16. Dukuh Betoro Kidul | : Sadeli |
| 17. Staff | : Nyamin |
| 18. Staf | : Radik Arlistiawan |

Pada tahun 2019 Ibu Suparni (Kaur. Keuangan) memasuki masa pensiun dan untuk sementara waktu diisi dengan penjabat dan yang ditunjuk adalah Ibu Ria Ristiani (Kaur TU dan Umum).

Pada Bulan Desember tahun 2019 Pemerintah kalurahan melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.

Dalam proses ujian penyaringan yang memperoleh nilai tertinggi dan diangkat menjadi Kepala Urusan Keuangan adalah Ibu Desy Rochmawati, S.Pd.

Sehingga susunan perangkat desa pada awal tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Sekretaris Desa | : Krisnawati, S,Pd |
| 2. Kasi.Pembangunan | : Endriyanto, SE |
| 3. Kasi. Pemerintahan | : Kasdi |
| 4. Kasi Pelayanan | : Aan Dwi Wahyudi |
| 5. Kaur. Keuangan | : Desy Rochmawati, S.Pd |
| 6. Kaur Tata Usaha dan Umum | : Ria Ristiani |

- | | | |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 7. | Kaur Perencanaan | : Komari |
| 8. | Dukuh Klepu | : Saronto |
| 9. | Dukuh Karangasem | : Joko Sarjono, SE |
| 10. | Dukuh Jomblang Tengah | : Riyanta |
| 11. | Dukuh Jati | : Warijan |
| 12. | Dukuh Jomblang Lor | : Warsito |
| 13. | Dukuh Ngabean Lor | : Agus Saryanto |
| 14. | Dukuh Ngabean Kidul | : Yulianton |
| 15. | Dukuh Betoro Lor | : Karjiyo |
| 16. | Dukuh Betoro Kidul | : Sadeli |
| 17. | Staff | : Nyamin |
| 18. | Staf | : Radik Arlistiawan |

Pada bulan Mei Tahun 2020, terjadi perubahan nomenklatur terhadap sebutan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Kalurahan seiring dengan diberlakukannya undang-undang Keistimewaan. Sehingga juga terdapat perubahan sebutan atas perangkat desa menjadi Pamong Kalurahan dan jabatan-jabatannya. Adapun perubahan sebutan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa menjadi Lurah
2. Sekretaris Desa menjadi Carik
3. Kasi Pemerintahan menjadi Jagabaya
4. Kasi Kesejahteraan menjadi Ulu Ulu
5. Kasi Pelayanan menjadi Kamituwa
6. Kaur Keuangan menjadi Kaur Danarta
7. Kaur Perencanaan menjadi Kaur Pangripta
8. Kaur Tata Usaha dan Umum menjadi Kaur Tata Laksana
9. Dukuh menjadi Dukuh.

Pada tahun 2021 diadakan Pemilihan Lurah serentak di Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021, bersama 58 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Kalurahan Ponjong juga melaksanakan pemilihan lurah. Pada saat itu terdapat dua calon yang mendaftar Lurah Karangasem periode 2021-2027, yaitu :

1. Bapak Parimin, S.Pd
2. Bapak Letda (Purn) Gunanto
3. Army Yuryayanti, S.Pd

Pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar dan baik, dan yang terpilih dengan suara terbanyak adalah Bpk. Parimin, S.Pd yang kemudian ditetapkan dan dilantik menjadi Lurah Karangasem untuk periode 2021-2027, pelantikan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021.

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Letak Geografis

Secara geografis Kalurahan Karangasem terletak di -8.002.4442 dan 110.7401646 atau sebelah Timur Kota Ponjong Kabupaten Gunungkidul dengan jarak \pm 20 Km dari ibukota Kabupaten (Kota Wonosari).

Kalurahan Karangasem berada di wilayah timur Kapanewon Ponjong yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Dengan potensi yang dimiliki, baik secara geografis maupun secara kewilayahan, Kalurahan Karangasem mempunyai daya dukung untuk berkembang. Antara lain Pontesi wisata goa, lokasi Dentinasi Wisata (DW)/Taman Kehati Eroniti dan Telaga Sunut serta Luweng Danatirta.

Jika dilihat dari tata guna lahan yang ada, secara umum Kalurahan Karangasem dapat digambarkan bahwa; fungsi wilayah perencanaan masih didominasi ruang terbuka berupa lahan . Hal ini masih memerlukan pengembangan sumber daya air untuk pemanfaatan lahan kering dimusim kemarau

Kalurahan Karangasem, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, mempunyai luas 760, 0680 ha, yang terdiri atas 9 (sembilan) Padukuhan.

2.1.2.2. Orbitasi

Letak Kalurahan Ponjong menurut Orbitasi adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak ke ibukota Kapanewon : 5 km
 - Lama jarak tempuh kendaraan bermotor: 0,20 jam
 - Lama jarak tempuh berjalan kaki : 1 jam
 - Kendaraan umum : tidak ada

- 2) Jarak ke ibukota kabupaten : 20 km
- Lama jarak tempuh kendaraan bermotor: 0,50 jam
 - Lama jarak tempuh berjalan kaki : 5 jam
 - Kendaraan umum : tidak ada
- 3) Jarak ke ibukota provinsi : 80 km
- Lama jarak tempuh kendaraan bermotor: 2,5 jam
 - Lama jarak tempuh berjalan kaki : 12 jam
 - Kendaraan umum : tidak ada

2.1.2.3. Batas Wilayah

Secara administratif batas wilayah Kalurahan Karangasem adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kalurahan Sumbergiri
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Basuhan dan Desa Glinggang Kab. Wonogiri, JATENG
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kalurahan Bedoyo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kalurahan Ponjong.

2.1.2.4. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul padatahun 2021 adalah 2.607 jiwa,terdiridari 1.305 laki-laki dan 1.302 perempuan. Rasio jenis kelamin laki-laki di Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul 100,002 %,ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 1

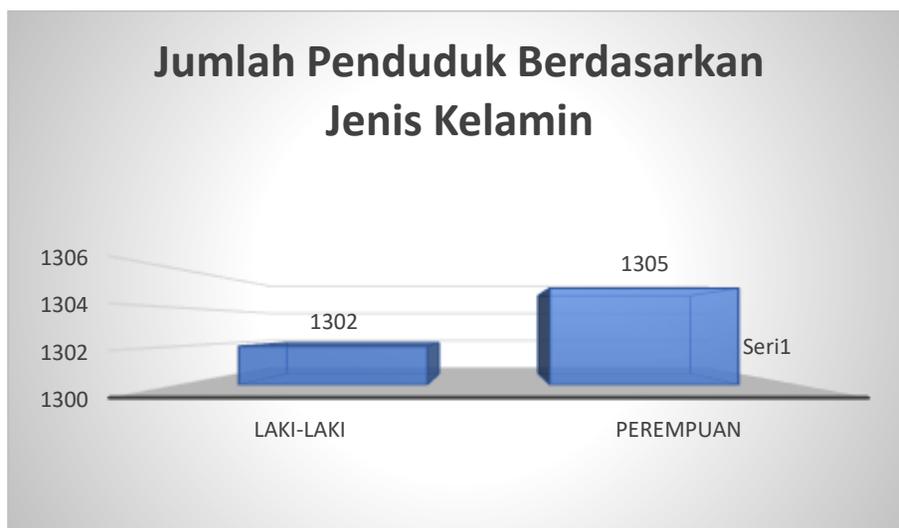
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase	Keterangan
----	---------------	--------	------------	------------

1	Perempuan	1.302	49,94 %	
2	Laki-laki	1.305	50,06 %	
	Jumlah	2.607	100 %	

Grafik 1

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin



Adapun sebaran jumlah Penduduk di setiap Padukuhan di Kalurahan Karangasem dapat dilihat dalam tabel 2, untuk jumlah penduduk terbanyak adalah di Padukuhan Klepu yaitu sejumlah 367 jiwa dan terkecil di Padukuhan Karangasem yaitu sejumlah 180 jiwa.

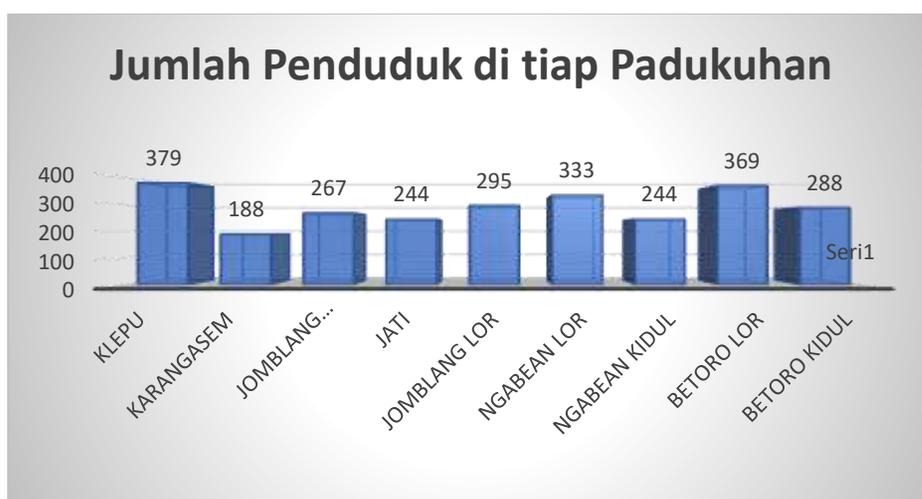
Tabel 2

Jumlah Penduduk di tiap Padukuhan

No	Padukuhan	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1	KLEPU	379	209	170
2	KARANGASEM	188	87	101
3	JOMBLANG TENGAH	267	136	131
4	JATI	244	120	124
5	JOMBLANG LOR	295	144	151
6	NGABEAN LOR	333	165	168
7	NGABEAN KIDUL	244	124	120
8	BETORO LOR	369	172	197
9	BETORO KIDUL	288	148	140

Grafik 2

Jumlah Penduduk berdasarkan di tiap padukuhan



Penduduk Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong

Kabupaten Gunungkidul sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 35-39 tahun.

Gambaran jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3

Jumlah Penduduk berdasarkan usia

No	Kelompok usia	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1	Dibawah 1 Tahun	50	26	24
2	2 s/d 4 Tahun	60	30	30
3	5 s/d 9 Tahun	133	65	68
4	10 s/d 14 Tah	146	67	79
5	15 s/d 19 Tahun	152	75	77
6	20 s/d 24 Tahun	182	92	90
7	25 s/d 29 Tahun	182	97	85
8	30 s/d 34 Tahun	174	92	82
9	35 s/d 39 Tahun	175	83	92
10	40 s/d 44 Tahun	176	86	90

11	45 s/d 49 Tahun	176	81	95
12	50 s/d 54 Tahun	179	82	97
13	55 s/d 59 Tahun	153	70	83
14	60 s/d 64 Tahun	155	72	82
15	65 s/d 69 Tahun	158	65	93
16	70 s/d 74 Tahun	141	55	86
17	Diatas 75 Tahun	70	44	26
	Jumlah	2462	1183	1279

Grafik 3

Jumlah Penduduk berdasarkan usia



Penduduk Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada umumnya memeluk agama Islam (99,75 %), disusul kemudian pemeluk agama Kristen (0,25 %), sedangkan Katholik (0,15 %). Tidak ada penduduk di kalurahan Ponjong yang memeluk Agama Hindu, Budha, Konghucu maupun aliran kepercayaan.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 4

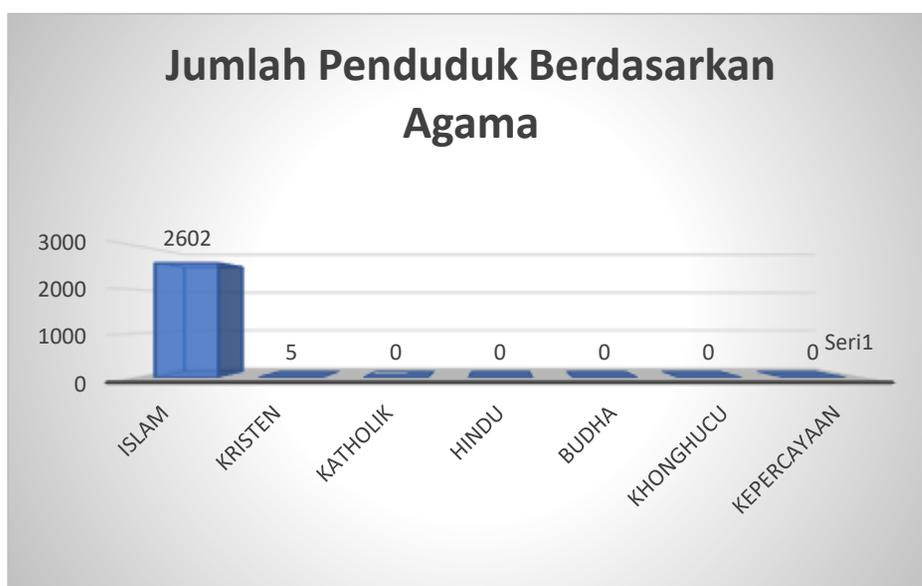
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Kelompok usia	Jumlah	Prosentase
----	---------------	--------	------------

		Jiwa	
1	ISLAM	2.602	99.92 %
2	KRISTEN	5	0.08 %
3	KATHOLIK	0	0.00 %
4	HINDU	0	0.00%
5	BUDHA	0	0.00 %
6	KHONGHUCU	0	0.00 %
7	Kepercayaan	0	0.00 %
JUMLAH		2.607	100 %

Grafik 4

Keadaan Penduduk berdasarkan Agama



Jumlah Kepala keluarga 886 terdiri kepala keluarga laki-laki 771 KK dan kepala keluarga perempuan 115.

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan

Kalurahan Karangasem terletak di sebelah timur ibu kota Kapanewon Ponjong, kondisi warganya merupakan masyarakat perdesaan. Kondisi sosial kemasyarakatannya masih kental dengan sifat gotong-royong, toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan.

Berbagai kegiatan sosial, budaya dan agama menjadi

agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan seperti kerjabakti, gotong royong, Sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan bersama di tanah lapang, upacara-upacara hari besar nasional dan lain sebagainya, sehingga Kalurahan Karangasem termasuk Kalurahan yang memiliki semangat gotong royong dan kebersamaan yang tinggi. Selain hal tersebut diatas, kelompok-kelompok olahraga, Kelompok-kelompok seni, komunitas komunitas lainnya juga tumbuh subur di wilayah Kalurahan Karangasem.

2.1.4. Kondisi ekonomi Kalurahan

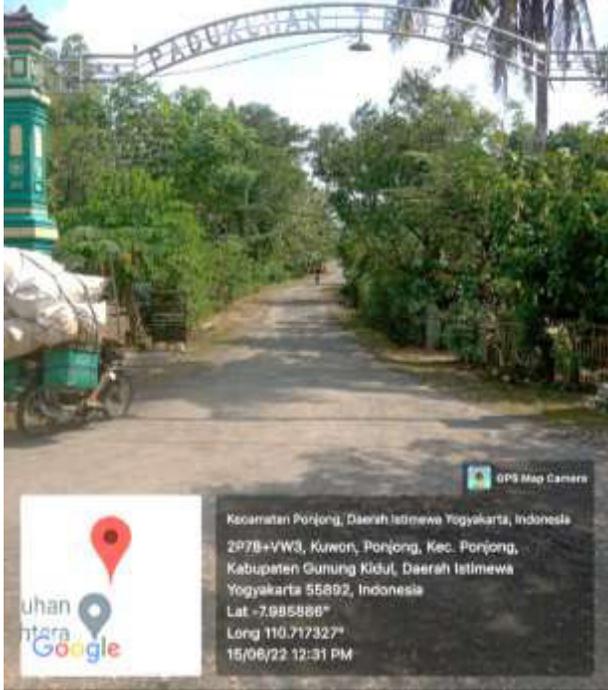
Sebagian besar warga Kalurahan Karangasem berprofesi sebagai Petani dan peternak dengan prosentase sebesar 60%. Di Kalurahan Karangasem juga terdapat Kios Desa yang berlokasi di Padukuhan Jati, dimana hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perputaran roda ekonomi di tingkat Kalurahan. Potensi ekonomi di Kalurahan Karangasem juga ditunjang dari sektor industri olahan makanan, kerajinan dan UMKM.

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan

Sarana dan prasarana umum di Kalurahan Karangasem relatif memadai, akan tetapi di beberapa wilayah Padukuhan kondisi infrastruktur jalan lingkungan terlihat dalam kondisi yang kurang baik. Meskipun setiap tahun dilaksanakan perawatan dan rehabilitasi terhadap infrastruktur jalan tersebut, tetapi mengingat infrastruktur dan fasilitas umum yang ada di Kalurahan Karangasem begitu banyak, sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana jalan masih sangat perlu ditingkatkan.

Adapun terkait dengan gambaran umum tentang kondisi infrastruktur, di wilayah Kalurahan Karangasem dapat dilihat pada gambar berikut ini :

	<p>Foto keadaan jalan di ruas jalan Kabupaten (jalur menuju asemblulang Sidorejo Ponjong)</p>
	<p>Foto keadaan jalan di ruas jalan Kabupaten (jalur menuju asemblulang Sidorejo Ponjong)</p>
	<p>Foto keadaan ruas jalan Kalurahan di Padukuhan Padangan.</p>

	<p>Foto keadaan ruas jalan Kalurahan di Padukuhan Tembesi</p>
	<p>Foto keadaan Kolam penampungan air di sebelah selatan kolam renang water byur. Keadaannya mangkrak dan perlu dilakukan direhabilitasi untuk pengembangan wisata. Bisa dibangun spot selfi untuk pengunjung water byur.</p>
	<p>Foto keadaan Kolam mata air di kolam sumber Ponjong.</p>

Adapun untuk Peta Batas wilayah di padukuhan, peta tata guna lahan, peta keadaan jalan dan lain sebagainya dapat dilihat dalam lampiran.

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Berikut ini merupakan tabel luas wilayah, Jumlah RW dan RT di Padukuhan se Kalurahan Karangasem.

Tabel 5.

Luas Wilayah dan pembagian Padukuhan di Kalurahan Ponjong

No	Nama Padukuhan	Luas wilayah (ha)	Prosentase (%)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	KLEPU	90,638	11,92	1	4
2.	KARANGASEM	91,2355	12,00	1	4
3.	JOMBLANG TENGAH	87,321	11,49	1	4
4.	JATI	81,321	10,7	1	4
5.	JOMBLANG LOR	86,1495	11,33	1	4
6.	NGABEAN LOR	84,3095	11,09	1	4
7.	NGABEAN KIDUL	81,979	10,79	1	4
8.	BETORO LOR	78,1485	10,28	1	4
9.	BETORO KIDUL	78,966	10,39	1	4
	Jumlah	760,0680	100.00 %	9	36

Sumber Data : Database Kalurahan Karangasem

Grafik 5

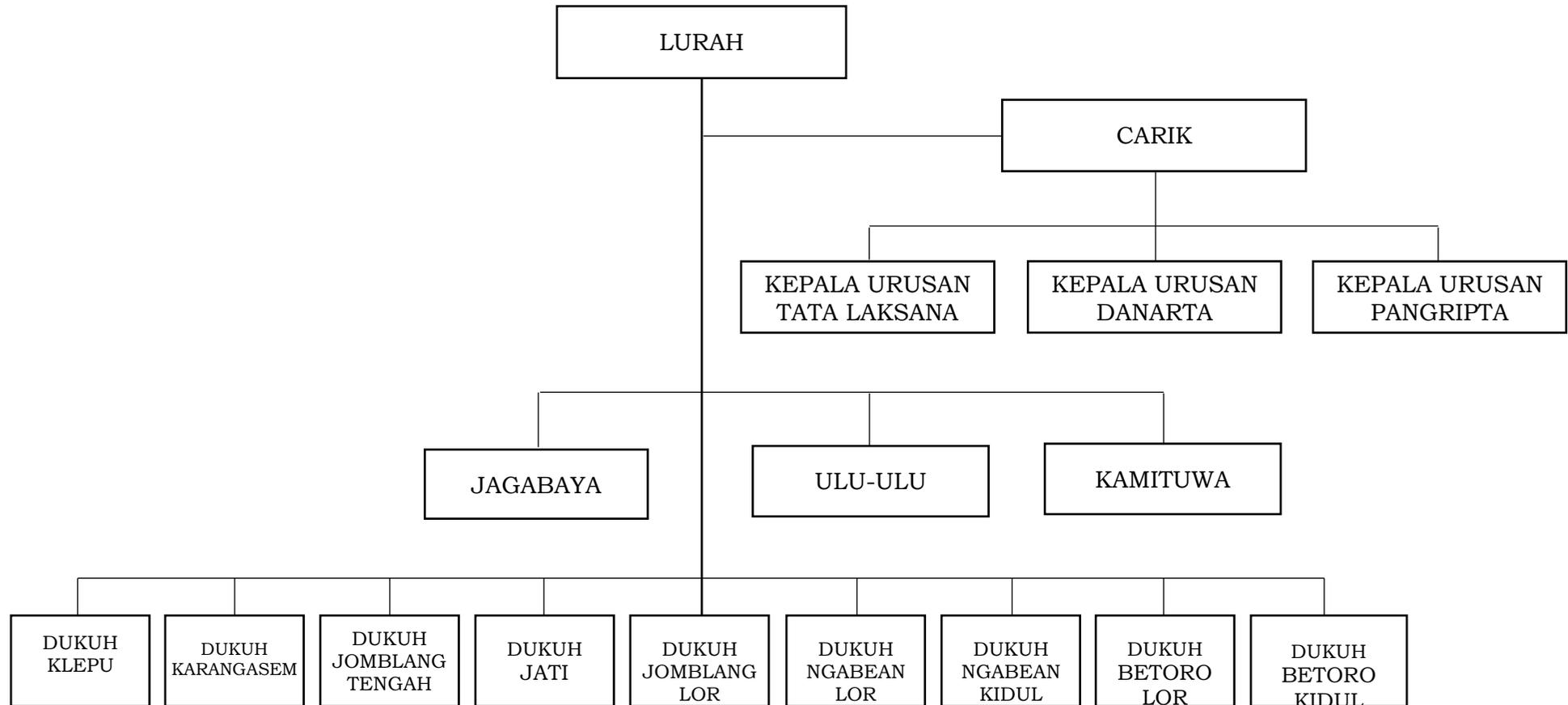
Luas Wilayah per Padukuhan di Kalurahan Karangasem



2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ponjong adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM



Adapun data rinci terkait dengan Pamong Kalurahan Ponjong adalah sebagai berikut :

**DATA LURAH DAN PAMONG KALURAHAN KARANGASEM KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022**

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Agama	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1.	PARIMIN, S.Pd	Gunungkidul, 06-02-1961	S1	Lurah	S1	
2.	KRISNAWATI, S.Pd	Gunungkidul, 09-12-1987	S1	Carik	S1	
3.	KASDI	Gunungkidul, 17-01-1972	SLTA	Jagabaya	SLTA	
4.	ENDRIYANTO, S.E	Gunungkidul, 01-02-1975	S1	Ulu-Ulu	S1	
5.	AAN DWIWAHYUDI	Gunungkidul, 27-02-1991	SLTA	Kamituwa	SLTA	
6.	RIA RISTIANI	Gunungkidul, 09-06-1987	D 1	Tata Laksana	D 1	
7.	KOMARI	Gunungkidul, 30-08-1975	SLTA	Pangripta	SLTA	
8.	DESY ROCHMAWATI,S.Pd	Gunungkidul, 11-12-1995	S1	Danarta	S1	
9.	MAHENDRA,S.Pd	Gunungkidul, 08-11-1995	S1	Dukuh Klepu	S1	
10.	JOKO SARJONO, S.E	Gunungkidul, 30-09-1983	S1	Dukuh Karangasem	S1	
11.	RIYANTA	Gunungkidul, 04-10-1975	SLTA	Dukuh Jomblang Tengah	SLTA	
12.	WARIJAN	Wonogiri,05-07-1969	SLTA	Dukuh Jati	SLTA	

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Agama	Jabatan	Pendidikan	Ket.
13.	WARSITO	Gunungkidul, 24-04-1974	SLTA	Dukuh Jomblang Lor	SLTA	
14.	AGUS SARYANTO	Gunungkidul, 09-08-1987	SLTA	Dukuh Ngabean Lor	SLTA	
15.	YULIANTON	Gunungkidul, 20-11-1988	SLTA	Dukuh Ngabean Kidul	SLTA	
16.	KARJIYO	Gunungkidul, 25-08-1975	SLTA	Dukuh Betoro Lor	SLTA	
17.	SADELI	Gunungkidul, 26-05-1978	SLTA	Dukuh Betoro Kidul	SLTA	
18.	NYAMIN	Gunungkidul, 07-01-1970	SLTA	Staf Pamong	SLTA	
19.	RADIK ARLISTYAWAN	Gunungkidul, 08-07-1993	SLTA	Staf Pamong	SLTA	

2.2.3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Beberapa Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Karangasem telah terbentuk, diantaranya adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), PKK, Karang Taruna, RT dan RW. Berikut daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Karangasem beserta pengurus-pengurusnya :

2.2.3.1. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Ponjong periode Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.

Daftar Pengurus Bamuskal Kalurahan Ponjong

No	Nama	Jabatan
1.	RATIYO	Ketua
2.	WALUYO.	Wakil Ketua
3.	ENDANG RUDIYATUN, S.Sos	Sekretaris
4.	SUWADI	Ketua Bidang Pemerintahan desa dan Pembinaan Masyarakat
5.	SUTRISNO	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	BARNO	Anggota
7.	KUSWANTO	Anggota

2.2.3.2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)

Adapun Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Kalurahan Ponjong adalah sebagai berikut :

Tabel 7.

Pengurus LPMKal Kalurahan Ponjong

No.	Nama	Jabatan
1.	SUTRISNO, S.Ag	Ketua
2.	Mujiyanto	Wakil Ketua
3.	Aris Pantoro, SE	Sekretaris
4.	Rina Wahyuningsih	Bendahara
5.	Misranto	Seksi Prasarana Wilayah
6.	Sugiyatno	Anggota
7.	Sutanto	Seksi Perekonomian
8.	Sumiyarno	Seksi Kesejahteraan Rakyat
9.	Yoga Saputra	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
10.	Ernawati	Seksi Pemberdayaan Perempuan
11.	Dwi Widiastuti	Anggota
12.	Agus Setyanto	Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian
13.	Wahyu Santosa	Anggota

2.2.3.3. PKK

Pengurus PKK Kalurahan Karangasem adalah sebagai berikut :

Tabel 8.

Pengurus PKK Kalurahan Ponjong

No.	Nama	Jabatan
1.	Siti Nurhayati, S.Pd	Ketua PKK
2.		Ketua I
3.		Ketua II
4.		Ketua II
5.		Bendahara
6.		Bendahara I
7.		Bendhaara II
8.		Bendahara III
9.		Sekretaris I

No.	Nama	Jabatan
10.		Sekretaris II
11.		Sekretaris III
12.		Ketua Pokja I
13.		Anggota
14.		Anggota
15.		Anggota
16.		Ketua Pokja II
17.		Anggota
18.		Anggota
19.		Anggota
20.		Ketua Pokja III
21.		Anggota
22.		Anggota
23.		Anggota
24.		Ketua Pokja IV
25.		Anggota
26.		Anggota
27.		Anggota

2.2.3.4. Karang Taruna

Karang Taruna Kalurahan Karangasem bernama Karang Taruna “KARYA MANUNGGAL BAKTI”. Adapun pengurus karang taruna Maju Harapan Kalurahan Karangasem Periode 2022-2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 9.

Daftar Pengurus Karang Taruna “KARYA
MANUNGGAL BAKTI”
Kalurahan Karangasem

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepengurusan Karang Taruna
1.	SUYANA	Ketua
2.	WIWIN ARDIYANTO	Wakil Ketua
3.	DWI WAHUDIN	Sekretaris
4.	DITYA FAJAR P.	Wakil Sekretaris
5.	ENDI RIYANTO	Bendahara
6.	ISMAIL WIBOWO	Wakil Bendahara
7.	MRIYANTO	Seksi Organisasi dan Diklat
8.	RUBINA	Seksi Organisasi dan Diklat
9.	NOVI ARIFIN	Seksi Pendidikan Masyarakat
10.	INDRA SURYA RAMADAN	Seksi Pendidikan Masyarakat
11.	WADIYANTO	Seksi Kesejahteraan Sosial
12.	AGUS SETYANTO	Seksi Kesejahteraan Sosial
13.	DEDEN SUPRIYANTO	Seksi Peningkatan Ekonomi Koperasi
14.	MAULANA HUSEN	Seksi Peningkatan Ekonomi Koperasi
15.	WAHYU FAJARYANTO	Seksi Kerohanian/ Pembinaan Mental
16.	SUKIYAR	Seksi Kerohanian/ Pembinaan Mental
17.	WAHYU SANTOSA	Seksi Olahraga
18.	AHMAD SODIQ	Seksi Olahraga
19.	RAHMAD TRIYANTO	Seksi Humas
20.	ANDRI SUCAHYO	Seksi Humas
21.	RIZKI OKI ADIVIAN	Seksi Lingkungan Hidup
22.	SUMIYARNO	Seksi Lingkungan Hidup
23.	WARDANI	Seksi Bina Remaja
24.	DWI WAHONO	Seksi Bina Remaja

2.2.3.5. Pengurus RT/RW

Jumlah RT di Kalurahan Ponjong sebanyak 46 RT, sedangkan RW jumlahnya adalah 11. Adapun pengurus RT/RW se Kalurahan Ponjong adalah sebagai berikut :

Tabel 10.

Pengurus RT/RW se Kalurahan Ponjong

No.	Nama	Jabatan
1.	WARBITO	Ketua RW. 01, Klepu
2.	SURADI	Ketua RT 01, Klepu
3.	SUPANTO	Ketua RT 02, Klepu
4.	TRISNO WIBOWO	Ketua RT 03, Klepu
5.	KARSIMAN	Ketua RT 04, Klepu
6.	SUGIYONO	Ketua RW. 02, Karangasem
7.	SUMANTO	Ketua RT. 01, Karangasem
8.	WARNO SUWITO	Ketua RT. 02, Karangasem
9.	MURDIYANTO	Ketua RT. 03, Karangasem
10.	MUGIYANTO	Ketua RT. 04, Karangasem
11.	ADI WINOTO	Ketua RW. 03, Jomblang Tengah
12.	JARTO	Ketua RT. 01, Jomblang Tengah
13.	KASIO	Ketua RT. 02, Jomblang Tengah
14.	KASDI	Ketua RT. 03, Jomblang Tengah
15.	SARNO	Ketua RT. 04, Jomblang Tengah
16.	MUDI HARSONO	Ketua RW. 04, Jati
17.	ADI SAROYO	Ketua RT. 01, Jati
18.	MURTANTO	Ketua RT. 02, Jati
19.	NURDIN WAHONO	Ketua RT. 03, Jati
20.	SURISMAN	Ketua RT. 04, Jati
21.	RATIYO	Ketua RW. 05, Jomblang Lor
22.	SUKINO	Ketua RW. 01, Jomblang Lor
23.	ARISTIYANTO	Ketua RW. 02, Jomblang Lor
24.	TUKARDI	Ketua RW. 03, Jomblang Lor

No.	Nama	Jabatan
25.	SUHENI	Ketua RW. 04, Jomblang Lor
26.	WADIYANTO	Ketua RW 06 Ngabean Lor
27.	BUDI HARTONO	Ketua Rt 01 Ngabean Lor
28.	MENTO RAHARJO	Ketua Rt 02 Ngabean Lor
29.	SAMIJO	Ketua Rt 03 Ngabean Lor
30.	ALIS PRASETYO	Ketua Rt 04 Ngabean Lor
31.	SUHARNO, SH	Ketua RW 07 Ngabean Kidul
32.	TUKIRAN	Ketua RT 01 Ngabean Kidul
33.	NGATINO	Ketua RT 02 Ngabean Kidul
34.	DIYARTO	Ketua RT 03 Ngabean Kidul
35.	RUBIYO	Ketua RT 04 Ngabean Kidul
36.	PARTOREJO	Ketua RW 08 Betoro Lor
37.	SAROYO	Ketua RT 01 Betoro Lor
38.	SUNANTO	Ketua RT 02 Betoro Lor
39.	MUSIRAN	Ketua RT 03 Betoro Lor
40.	MUKIMIN	Ketua RT 04 Betoro Lor
41.	MISRANTO	Ketua RW 09 Betoro Kidul
42.	AHMAT JUPRI	Ketua RT 01 Betoro Kidul
43.	RUSDIYANTO	Ketua RT 02 Betoro Kidul
44.	SUSILO	Ketua RT 03 Betoro Kidul
45.	JAMHARI	Ketua RT 04 Betoro Kidul

2.3. POTENSI DAN MASALAH

2.3.1. Potensi

Kalurahan Karangasem memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam bidang Pertanian dan Peternakan, industri kecil, perdagangan dan jasa. Disamping itu, potensi Sumber Daya Manusia Kalurahan Karangasem juga sangat baik, dilihat dari kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang ditempuh maupun keterampilan lain yang dimiliki oleh warga masyarakat di Kalurahan Karangasem. Hal ini

menjadi modal yang besar untuk memajukan dan mensejahterakan warga masyarakat Kalurahan Karangasem.

2.3.1.1. Potensi Sumber Daya Alam

- a. Lahan pertanian tegal yang luas dan produktif
- b. Letak geografis yang mudah dijangkau

2.3.1.2. Potensi Sumber Daya Manusia

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang terdidik
- b. Jumlah kelompok usia produktif yang tinggi
- c. Warga masyarakat yang kreatif dan inovatif
- d. Warga masyarakat memiliki jiwa wirausaha yang kuat dan semangat
- e. Wargamasyarakat yang mempunyai pola pikir maju dalam mengikuti perkembangan teknologi.

2.3.1.3. Potensi Ekonomi

- a. Kios Kalurahan
- b. Industri Rumah Tangga, Industri Kecil & UMKM yang cukup banyak dan beragam
- c. Pemanfaatan teknologi informasi yang sangat berkembang
- d. Iklim & lingkungan usaha yang representatif serta kompetitif
- e. Usaha dibidang pertambangan galian C

2.3.1.4. Potensi Sosial Budaya

- a. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- b. Keragaman budayamasyarakat dipadukuan-padukuan merupakan aset potensial dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan.
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi kalurahan
- e. Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah

2.3.2. Masalah

Agar Pembangunan di Kalurahan dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, Pemerintah kalurahan harus tanggap terhadap kondisi yang ada dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah dan strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Diantara permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 2.3.2.1. Infrastruktur Jalan Lingkungan permukiman di wilayah padukuhan belum terbangun dengan baik
- 2.3.2.2. Sarana dan prasarana jalan lingkungan permukiman seperti saluran drainase, talud dan jembatan masih perlu ditingkatkan. Bahkan di beberapa padukuhan sarana prasarana jalan lingkungan tersebut keadaannya masih perlu perbaikan.
- 2.3.2.3. Perlengkapan jalan masih kurang.
Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu-rambu lalu lintas di jalur jalan kalurahan belum merata. Hal ini mengakibatkan munculnya potensi masalah keamanan dan sosial.
- 2.3.2.4. Personil yang terlibat dalam kegiatan Pemerintahan terbatas dan monoton.
Hal ini perlu peningkatan peran serta warga masyarakat dalam kegiatan di Pemerintahan Kalurahan
- 2.3.2.5. Kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) terhadap APB-Kalurahan masih rendah.
Sumbangan Pendapatan Asli Kalurahan dari pengelolaan aset Kalurahan masih rendah sehingga anggaran dalam APB-Kalurahan belum bisa maksimal mengakomodir kegiatan potensial yang akan dilaksanakan.

VISI DAN MISI

3.1. VISI

Visi adalah gambaran/cita-cita bersama mengenai masa depan, berupa kesepakatan/komitmen murni. Visi berguna untuk menentukan perubahan lingkungan sehingga pemerintah dapat bergerak maju menuju masa depan yg lebih baik. Visi dari Pemerintah Kalurahan Karangasem adalah :

“GOTONG ROYONG MEMBANGUN KALURAHAN MANDIRI YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA”

Visi Kalurahan Karangasem merupakan perwujudan kedepan adalah terwujudnya pemerintah Kalurahan Karangasem yang jujur, adil dan bertanggungjawab artinya dalam menjalankan program pemerintah harus bersikap jujur, adil dan bertanggungjawab kepada masyarakat agar terwujud masyarakat yang berakhlak mulia, maju, sehat dan sejahtera dengan menumbuh kembangkan kembali sikap gotong royong dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut harus didukung dengan sistem pemerintahan yang baik, akuntable, terbuka dan pelayanan kepada masyarakat yang sistematis, cepat, tepat dan akurat yang tidak mengesampingkan keramahan dan pengayoman.

1.2 MISI

Misi merupakan rumusan secara umum dalam upaya yang akan oleh pemerintah desa dalam rangka menuwujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan dengan tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

Adapun Misi Kalurahan Karangasem sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Meningkatkan profesionalitas etos kerja Pamong Kalurahan dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan dalam melayani masyarakat.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana Kalurahan yang memadai
4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga masyarakat

5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat kalurahan yang maksimal
6. Meningkatkan kehidupan masyarakat kalurahan Karangasem secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
7. Mengembangkan ketersediaan fasilitas penunjang Kalurahan Wisata melalui program peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata aneka hayati
8. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di masing-masing Padukuhan.

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. STRATEGI INTERNAL

a. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia bertujuan untuk memberikan tambahan kemampuan dan ketrampilan kepada warga masyarakat, aparatur pemerintahan dan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan kalurahan dalam berbagai hal yang seiring dengan perkembangan teknologi dengan tetap memiliki wawasan nilai-nilai budaya yang luhur untuk meminimalkan dampak budaya di era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini.

b. Pemberdayaan warga masyarakat kalurahan

Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kesempatan, dorongan dan fasilitasi kepada warga masyarakat agar mandiri, mampu bersaing dan berdaya.

c. Pengembangan kapasitas kelembagaan

Dalam hal pengembangan kapasitas kelembagaan perlu meningkatkan sinergi antara warga masyarakat, aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan, lembaga-lembaga kalurahan dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan sehingga dapat mengambil peran sebagaimana fungsinya.

d. Pengembangan kapasitas lingkungan dan infrastruktur

Menitik beratkan pada pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang roda perekonomian.

e. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

Dengan adanya fasilitas teknologi yang ada dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi perlu dikembangkan dengan system terpadu dan terintegrasi dalam hal profil, pendataan dan pelayanan dasar kepada warga masyarakat.

f. Pengembangan Industri Kecil, Industri Rumah Tangga dan UMKM

Dalam rangka Pengembangan Industri Kecil, Industri Rumah Tangga

dan UMKM Pemerintah Kalurahan akan memberikan dukungan kepada pengembangan Industri Kecil, Industri Rumah Tangga dan UMKM dengan pengembangan teknologi informasi.

4.2. STRATEGI EKSTERNAL

a. Meningkatkan kerjasama untuk peningkatan potensi pendapatan kalurahan.

Menginventaris potensi dan peluang dalam bidang pengelolaan usaha yang dikembangkan oleh BUMKal Hanyukupi Kalurahan Karangasewm untuk kemudian membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, utamanya Pemerintah Kabupaten ataupun pihak swasta yang lain untuk menambah pendapatan kalurahan.

b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara kelembagaan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan.

Dalam menjalankan program/kegiatan Pemerintah Kalurahan harus selalu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan semua pihak. Hal demikian tentu saja akan memperlancar pelaksanaan semua program yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah Kalurahan.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Arah kebijakan Pembangunan Kalurahan tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan kalurahan dan beberapa faktor lain seperti Regulasi, SDM, SDA, Geografis, demografi, dan lain-lain. Arah kebijakan dibidang Keuangan Kalurahan dan Kebijakan Umum Anggaran dan Kebijakan Umum Kalurahan. Arah kebijakan pembangunan kalurahan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Kalurahan yang hendak dicapai meliputi 5 aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan masyarakat kalurahan, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan penanganan bencana alam.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Terlaksananya program-program penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

b. Bidang Pembangunan Kalurahan

Terlaksananya program-program pembangunan kalurahan untuk peningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, sarana prasarana utilitas publik dan sarana prasarana ekonomi warga.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan

Terlaksananya program-program pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan kondusif. Terwujudnya program-program dibidang keagamaan dan kebudayaan sehingga terawatnya nilai-nilai kebudayaan yang luhur dan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Terlaksananya program-program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia warga masyarakat kalurahan Karangasem guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Bidang Penangan Bencana dan Keadaan Mendesak Kalurahan

Terlaksananya program-program penanganan bencana dan keadaan

mendesak kalurahan diarahkan pada terlaksananya program-program mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana dan keadaan darurat/mendesak kalurahan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

a. Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Arah kebijakan keuangan kalurahan tercermin dalam APBKal dengan prinsip APBKal berbasis kinerja dan partisipatif (pemberdayaan masyarakat).

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan kalurahan, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan kalurahan meliputi pendapatan asli kalurahan (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus).

Selama 5 (lima) tahun terakhir pendapatan Kalurahan Karangasem mengalami peningkatan lebih kurang 5–10%. Berdasarkan realisasi pendapatan pada 5 tahun tersebut maka proyeksi pendapatan Kalurahan Karangasem pada 5 tahun mendatang diperkirakan sebagai berikut :

Tabel12.
Proyeksi Pendapatan Kalurahan
Karangasem

No	UraianPendapatan	Tahun(Rp.)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Pendapatan AsliKalurahan	24.470.000	85.000.000	87.000.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000
2.	PendapatanTransfer	1.560.304.600	1.638.319.800	1.720.235.700	1.806.247.500	1.896.560.000	1.991.387.000
3.	Pendapatan Lain-Lain	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	20.000.000
	JUMLAH	1.594.774.600	1.735.319.800	1.821.235.700	1.912.247.500	2.009.560.000	2.111.387.000

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dalam upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan(PAK) selama 6 (enam) tahun kedepan (2022–2027) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pengelolaan aset-aset kalurahan yang potensial dengan penerapan pengelolaan dan sistem prinsip transparansi.
- b. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Dana Desa

b. Arah Kebijakan Belanja Kalurahan

Pemerintah Kalurahan bersama BAMUSKal melaksanakan musyawarah dalam forum musyawarah bersama guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada capaian tahun-tahun sebelumnya serta regulasi yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Kalurahan tentang APBKal.

Kebijakan Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun. Belanja kalurahan dirinci menurut urusan pemerintahan kalurahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja kalurahan harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas sumber-sumber pendapatan kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran kalurahan. Belanja kalurahan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja kalurahan harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan.

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Kalurahan terdiri dari : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Dalam 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja Kalurahan Karangasem sebagai berikut :

Tabel7
 Proyeksi Belanja Kalurahan
 Karangasem

No	Uraian Belanja	Tahun(Rp.)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	BidangPenyelenggaraanPemerintahan	839.270.160	881.233.600	925.295.000	971.559.700	1.020.137.600	1.071.144.500
2.	BidangPelaksanaanPembangunan	318.421.500	627.655.200	660.288.200	694.552.700	730.530.600	768.306.000
3.	PendapatanPembinaanKemasyarakatan	10.585.000	25.500.000	26.775.000	28.113.800	29.519.500	30.995.500
4.	BidangPemberdayaanMasyarakat	75.172.500	78.931.000	82.877.500	87.021.300	91.372.300	95.941.000
5.	BidangPenanggulanganBencana	363.881.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	JUMLAH	1.607.330.160	1.638.319.800	1.720.235.700	1.806.247.500	1.896.560.000	1.991.387.000

Arah kebijakan belanja kalurahan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Karangasem, dimana pada level kebijakan anggaran belanja kalurahan dicerminkan pada proyeksi belanja kalurahan yang diharapkan dapat memnuhi kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- 1) Efisiensi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) pamong kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- 3) Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- 4) Peningkatan akses informasi tentang belanja kalurahan oleh masyarakat;
- 5) Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan kalurahan dan prioritas kebutuhan kalurahan serta pertimbangan kinerja.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan kalurahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan kalurahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan pembiayaan kalurahan diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Kalurahan. Struktur pembiayaan kalurahan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran deficit atau surplus.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNANKALURAHAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan Karangasem untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut :

A BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

- 1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
- 2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
 - Pengadaan peralatan kerja
 - Pengadaan mebeleur
 - Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
 - Pengadaan mesin/kartu absensi
 - Penyediaan jasa jaminan barang milik desa
 - Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- 3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyusunan monografi desa
 - Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
 - Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
- 4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa

- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- Penghargaan purna tugas bagi aparaturn pemerintahan desa
- Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa
- Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
- Pengadaan pakaian dinas/seragam
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
- Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

5 Sub Bidang Pertanahan

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin (PTSL)
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa
- Sertifikasi tanah milik desa
- Pengadaan tanah milik desa
- Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga
- Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
- Perapatan patok batas desa
- Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

B BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1 Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
- Pembinaan taman bacaan masyarakat
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2 Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

- Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
- Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
- Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
- Surveilans berbasis masyarakat
- Insentif kader kesehatan/KB
- Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa
- Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal
 - Pemeliharaan bangunan penampung air komunal
 - Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
 - Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
 - Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
 - Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
 - Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

- Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
- Pemberian stimulan jamban sehat
- Pengelolaan sampah desa/permukiman
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Hutan Milik Desa
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
- Pengelolaan Wana Desa
- Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa
- Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan
- Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- Pengelolaan radio komunitas milik desa
- Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

8 Sub Bidang Pariwisata

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
- Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
- Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten
- Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa
- Pemeliharaan Rest Area Milik Desa
- Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata

C BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
- Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
- Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
- Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
- Pembinaan Jaga Warga
- Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
- Pengadaan seragam Satlinmas
- Pembinaan dan pengembangan paralegal desa
- Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum

- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 - Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
 - Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
 - Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
 - Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
 - Pelaksanaan sunatan massal
 - Pembinaan lembaga desa pelestari adat
 - Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
 - Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
 - Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
 - Operasional Karang Taruna
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
- Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
- Pembinaan RT/RW
- Operasional LPMD dan/atau LPMD
- Operasional PKK
- Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- Pelatihan pengolahan hasil perikanan
- Pembinaan kelompok perikanan darat
- Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
- Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa

- Pemeliharaan lumbung desa
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
 - Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif
- 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - Peningkatan Kapasitas BPD
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
 - Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa
 - Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
 - Pembinaan ketahanan keluarga
 - Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
 - Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
 - Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)
 - Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak
 - Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional

- Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa
 - Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)
 - Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- Pemeliharaan Kios Milik Desa
 - Pembangunan/Rehab Kios Milik Desa
 - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 - Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- E BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
- 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
- Penanganan Keadaan Darurat
- 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
- Penanganan Keadaan Mendesak

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2027 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Kalurahan dalam kurunwaktu 6 (enam) tahun kedepan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Lurah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan Kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan kalurahan.

Pembangunan jangka menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasidan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam tata kelola pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada kalurahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, Muskal, forum koordinasi, dan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal). Pemerintah desa wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu: prinsip fisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM-Kalurahan, Kalurahan Karangasem Tahun 2022-2027 merupakan acuan bagi Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat sehingga tercapai program pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya dokumen RPJM Kalurahan dijadikan rujukan dan dasar

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan kalurahan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Kalurahan dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan).

7.2. Saran

Semua pihak diharapkan menyadari bahwa RPJM Kalurahan tidak saja dipahami sebagai produk politis, teknokratis dan aspiratif saja, lebih dari itu sebagai alat pengendali pemerintahan Kalurahan, sehingga masyarakat mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

Terlebih dari itu, kami atas nama Pemerintah Kalurahan juga selalu mengharapkan saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan maupun perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain di Kalurahan Ponjong. Dengan harapan ke depan Kalurahan Karangasem semakin berkembang, maju dan seluruh masyarakat di Kalurahan Karangasem mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin.

Demikian RPJM Kalurahan ini di buat, semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Karangasem, Juni 2022

Lurah Karangasem,

PARIMIN